



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO

LAPORAN MONITORING KINERJA KEPALA SEKRETARIAT PERIODE BULAN AGUSTUS TAHUN 2023

Jl. Drs. Ahmad Nadjamuddin No. 107 Kel. Limba U II
Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo

<http://www.gorontalo.bawaslu.go.id>

set.gorontalo@bawaslu.go.id

Bawaslu Provinsi Gorontalo

Bawaslu Gorontalo

Bawaslu Gorontalo



BERSAMA RAKYAT AWASI PEMILU, BERSAMA BAWASLU
TEGAKKAN KEADILAN PEMILU

Laporan Monitoring Kinerja Kepala Sekretariat Periode Agustus Tahun Anggaran 2023

Provinsi/Kabupaten/Kota: Provinsi Gorontalo

A. Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Manajemen Kepegawaian

1. Analisis Data (Data Kepegawaian Eksisting beserta Jumlah Kebutuhan Pegawai)
 - a) Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 120/KU.01.00/K1/03/2023 Tanggal 27 Maret 2023 Tentang Perubahan ke delapan Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 0085/KU.01.00/K1/12/2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dilingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 - b) Bahwa berdasarkan kebutuhan pegawai pada sekretariat Bawaslu Boalemo masih memerlukan perhatian dan dukungan Pemerintah Daerah dalam hal penugasan pegawai DPK sesuai Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B./853/M.SM.02.00/2021 tanggal 21 Desember 2021;
 - c) Bahwa penetapan jabatan PNS dengan status penugasan yang disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 - d) Sebagaimana Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Nomor 193/KU.00/SJ/06/2023 tentang Penetapan Satuan Kerja Unit Kerja Mandiri Bawaslu Kabupaten/Kota di Lingkungan Bawaslu, bahwa telah dilaksanakan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas dilingkungan Bawaslu, terutama sudah dilantiknya Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Bawaslu Kabupaten Pohuwato. Berikut adalah daftar Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Bawaslu Kabupaten Pohuwato yang dilantik:
 - Rahmat Mantau, S.Pd., M.Pd., M.Mpub. jabatan Kepala Subbagian Administrasi;
 - Asni Saiqi, S.Sos. jabatan Kepala Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum;
 - Herlinda Mansur, S.M. jabatan Kepala Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat.
 - e) Sebagaimana Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu Nomor 2253.1/KP.01.01/SJ/07/2023 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja Sekretaris Jenderal. Terdapat 1 (satu) orang Pegawai terlantik atas nama Agus Laingo yang ditempatkan pada Unit Kerja Sekretariat Bawaslu Kota Gorontalo dengan Jabatan Ahli Pertama Pranata Hubungan Masyarakat terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2023.
 - f) Penambahan pegawai PPPK memberikan tambahan dukungan sumber daya di Sekretariat Bawaslu Kota Gorontalo, di sisi lainnya terdapat pengurangan sumber daya manusia di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bone Bolango dikarenakan pegawai PPPK di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bone Bolango.
2. Permasalahan
 - a) Unit Kerja Mandiri Bawaslu Kabupaten Boalemo sudah memiliki Kuasa Pengguna Anggaran dan Penguasa Pengguna Barang berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan umum ter tanggal 27 Maret 2023 akan tetapi sampai dengan sekarang belum berubah menjadi Satker Bawaslu Kabupaten Boalemo.
 - b) Formasi jabatan yang disediakan dalam analisis jabatan pada sekretariat Bawaslu tidak bersesuaian dengan anjab pada instansi induk dalam hal Pemerintah Daerah.

- c) Penugasan PNS yang akan dipekerjakan di Sekretariat Bawaslu harus mendapatkan rekomendasi dari Menteri PANRB.
 - d) Lambatnya proses persetujuan pindah/lolos butuh dari Bawaslu.
 - e) Lambatnya Proses Persetujuan atas Pengajuan Gaji Berkala Periode Januari 2023
 - f) PNS yang bertugas diluar daerah tidak beroleh hak/jaminan perumahan
 - g) PPNPN yang akan diberhentikan sesuai dengan Peraturan Menpan RB.
 - h) Formasi pendidikan yang dibuka untuk PPPK Bawaslu tidak sesuai dengan jenis pekerjaan dan kebutuhan bawaslu.
 - i) Belum adanya perekrutan ASN untuk Bawaslu, membuat penambahan PNS Organik tidak akan terpenuhi dengan cepat pada Bawaslu Kota Gorontalo.
 - j) Ketidak jelasan status PPNPN memungkinkan pada tanggal 28 November 2023, Bawaslu Kota Gorontalo akan kehilangan Pegawai PPNPN. Yang mana hal ini secara keseluruhan akan mempengaruhi kinerja dalam hal Pengawasan Pemilu.
3. Rencana Tindak Lanjut
- a) Sudah Mengajukan Pengusulan Nama sebagai KPA, PPSPM, Bendahara untuk persiapan Satker Bawaslu Kabupaten Boalemo.
 - b) Pegawai Negeri Sipil Diperbantukan (PNS DPK) memiliki peran sangat strategis dalam menentukan netralitas penyelenggara pemilu. Sebagai lembaga Negara yang relatif muda, kesekretariatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu sebagian besar didukung oleh PNS DPK mulai dari tingkatan pusat hingga ke daerah, untuk itu sangat penting dalam hal penambahan PNS di tingkat Daerah mengingat peran PNS DPK sangat besar kontribusinya dalam menjalankan amanat Undang-Undang untuk menyelenggarakan dan mengawasi pemilu yang demokratis, untuk itu harus tetap bekerjasama dan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait permintaan PNS DPK.
 - c) Perlu perhatian khusus terkait tempat tinggal PNS yang ditugaskan di Luar Domisili.
 - d) PPNPN yang saat ini sedang berada di Bawaslu Kabupaten Boalemo agar tetap dipertahankan di Bawaslu mengingat masa kerja yang sudah lama dan masih dalam Tahapan.
 - e) Sudah Mengajukan usulan kenaikan Gaji berkala bagi Pegawai di Lingkungan Bawaslu Provinsi Gorontalo pada tanggal 6 Desember 2022 melalui email dan pengiriman dokumen dengan surat pengantar Nomor 085/KP.03.01/GO/03/2023.
 - f) Permasalahan yang terjadi sudah dikonsultasikan dengan Bawaslu Provinsi Gorontalo, dan masih menunggu kebijakan yang akan dikeluarkan oleh Bawaslu RI
 - g) Terdapat pegawai PPNPN yang lulus pada seleksi Calon Anggota Komisioner KPU Kabupaten/Kota Periode 2023 – 2028 atas nama:
 - Roy Hamrain Staf Teknis pada Bawaslu Provinsi Gorontalo;
 - Yuyun Antu Anggota Komisioner Bawaslu Kabupaten Boalemo;
 - Dian F. Pakaya Anggota Komisioner Bawaslu Kabupaten Pohuwato.

B. Keuangan

1. Analisis Data (Realisasi Anggaran)

- a. Dalam periode yang tercakup oleh laporan ini, Bawaslu Provinsi Gorontalo telah melakukan revisi anggaran sebanyak 5 kali. Berikut adalah rincian revisi anggaran yang telah dilakukan:
 - 1) Revisi Anggaran Ke-1 tanggal 23 Desember 2022:
 - Mekanisme revisi DJA dalam rangka revisi Automatic Adjustment (AA) belanja Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
 - 2) Revisi Anggaran Ke- 2 tanggal 20 Februari 2023:
 - Mekanisme revisi kanwil dalam rangka pemutakhiran revisi POK dan revisi halaman III DIPA.

- 3) Revisi Anggaran Ke- 3 tanggal 10 April 2023:
- Mekanisme revisi kanwil dalam rangka pemutakhiran revisi POK dan revisi halaman III DIPA.
- 4) Revisi Anggaran Ke- 4 tanggal 03 Juli 2023:
- Mekanisme revisi DJA dalam rangka Realokasi Anggaran Prioritas Nasional (PN) pada Pengawasan Tahapan Tahun Anggaran 2023.
- 5) Revisi Anggaran Ke- 5 tanggal 21 Juli 2023:
- Mekanisme revisi DJA dalam rangka pemutakhiran revisi POK dan Penyesuaian Belanja Kementerian/Lembaga yang berasal dari Blokir *Automatic Adjustment* T.A. 2023.
- b. Pada bulan Agustus Tahun 2023 Satker Bawaslu Provinsi Gorontalo telah merealisasikan anggaran sebesar Rp2,994,586,206,- dari pagu sebesar Rp50,374,641,000,- dengan persentase sebesar 5.94%. Satker Bawaslu Provinsi Gorontalo telah mencapai sejumlah pencapaian dalam realisasi anggaran. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2024 Satker Bawaslu Provinsi Gorontalo telah memanfaatkan anggaran dengan efisien dan transparan.
- c. Sedangkan pelaksanaan anggaran Tahun 2023 Satker Bawaslu Provinsi Gorontalo dengan realisasi belanja sampai dengan 31 Agustus Tahun 2023 secara keseluruhan mencapai 57.73% atau sebesar Rp29,079,408,394,- dari total pagu sebesar Rp50,374,641,000,-. Berikut adalah rincian realisasi anggaran perjenis belanja berdasarkan pada situs spanint.kemenkeu.go.id:

Keterangan	Jenis Belanja			Total
	Pegawai	Barang	Modal	
1	2	3	4	5
Pagu	5,594,916,000	44,599,725,000	180,000,000	50,374,641,000
Realisasi	4,293,809,837	24,650,548,557	135,050,000	29,079,408,394
Persentase	76.74%	55.27%	75.03%	57.73%

Adapun rincian dari Realisasi Belanja Pegawai (51) adalah sebagai berikut:

- 1) Pembayaran Gaji Ketua dan Anggota Provinsi dan Kabupaten/Kota bulan Agustus Tahun 2023 sebesar Rp2,036,047,500,-. Realisasi tersebut berupa honor Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo dan Bawaslu Kabupaten/Kota (Non Satker) Bulan Januari s/d Agustus, THR, dan Gaji 13.
- 2) Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS
 - i. Gaji Pokok
Realisasi Belanja Gaji Pokok PNS sampai bulan Agustus Tahun 2023 sebesar Rp.1,040,062,240,-. Gaji Pokok yang dibayarkan berupa gaji induk bulan Januari sampai Agustus, THR, Gaji 13, dan kekurangan gaji induk 4 pegawai (ditanyakan ke keuangan apabila ada kekurangan) bulan Januari 2023.
 - ii. Tunjangan Struktural
Realisasi Belanja Tunjangan Struktural PNS sampai bulan Agustus Tahun 2023 sebesar Rp.84,505,000. Realisasi tersebut berupa gaji induk bulan Januari sampai Agustus, THR, Gaji 13, dan kekurangan gaji induk 4 pegawai (ditanyakan ke keuangan apabila ada kekurangan) bulan Januari 2023.
 - iii. Tunjangan Fungsional
Realisasi Belanja Tunjangan Fungsional PNS sampai bulan Agustus Tahun 2023 sebesar Rp.42,141,000,-. Realisasi tersebut berupa tunjangan bulan Januari sampai Agustus, THR dan Gaji 13.
 - iv. Tunjangan Kinerja
Realisasi Belanja Tunjangan Kinerja PNS sampai bulan Agustus 2023 sebesar Rp.893,494,186,-. Realisasi tersebut berupa tunjangan kinerja bulan Januari sampai Juli, THR, Gaji 13.

3) Uang Makan PNS

- i. Belanja Uang Makan PNS sampai bulan Juli Tahun 2023 sebesar Rp.152,751,000,-. Realisasi tersebut berupa uang makan PNS bulan Januari sampai Juli Tahun 2023.

Untuk Realisasi Belanja Barang (52) di Bawaslu Provinsi Gorontalo melalui mekanisme Pembayaran dengan menggunakan sistem:

1) Tambahan Uang Persediaan (TUP)

Hingga bulan Agustus Tahun 2023 Bawaslu Provinsi Gorontalo telah mengajukan 1 kali TUP dengan rincian TUP ke-1 sebagai berikut:

TUP KE-1			
NO	SPM	PROVINSI/KAB/KOTA	NILAI SP2D
1	00214A	Provinsi Gorontalo	Rp.275.418.000,-

Pengajuan Tambahan Uang Persediaan (TUP) ke-1 sebesar Rp.275.418.000,- dengan total realisasi sebesar Rp.275.418.000,- atau 100%. Dengan pengembalian ke Kas Negara sebesar Rp,0,- atau 0.00%.

2) Ganti Uang Persediaan (GUP)

Ganti Uang Persediaan Tunai dipergunakan untuk keperluan membiayai operasional sehari-hari Satker dan/atau membiayai pengeluaran yang tidak dapat dilakukan melalui pembayaran LS. UP Tunai diwajibkan untuk melakukan penggantian (revolving) minimal 1 (satu) kali dalam satu bulan. Hingga bulan Agustus Tahun 2023 terdapat penggantian GUP Tunai sebanyak 62 SPM dengan total **Rp.4,113,065,837,-** untuk seluruh kabupaten/kota (non satker) dan provinsi sebagai berikut:

NO	NO SPP	NO SPM	NO SP2D	NILAI SP2D
1	00034T	00034A	230501302000240	Rp99,985,501
2	00029T	00029A	230501302000225	Rp25,172,938
3	00035T	00035A	230501302000246	Rp33,815,190
4	00038T	00038A	230501302000268	Rp49,968,269
5	00041T	00041A	230501302000287	Rp30,635,736
6	00051T	00051A	230501302000454	Rp99,896,572
7	00062T	00062A	230501302000466	Rp37,053,189
8	00072T	00072A	230501302000595	Rp42,328,500
9	00078T	00078A	230501302000645	Rp46,016,500
10	00095T	00095A	230501302000704	Rp99,996,722
11	00112T	00112A	230501302000880	Rp42,427,461
12	00118T	00118A	230501302000960	Rp42,444,312
13	00120T	00120A	230501302000923	Rp99,834,715
14	00143T	00143A	230501302001152	Rp43,997,157
15	00144T	00144A	230501302001124	Rp29,073,601
16	00153T	00153A	230501302001180	Rp99,965,670

17	00154T	00154A	230501302001248	Rp49,999,323
18	00197T	00197A	230501302001663	Rp49,959,100
19	00198T	00198A	230501302001811	Rp31,862,026
20	00201T	00201A	230501302001664	Rp99,965,421
21	00217T	00217A	230501302002021	Rp49,999,680
22	00223T	00223A	230501302002022	Rp49,744,996
23	00257T	00257A	230501302002385	Rp99,893,643
24	00258T	00258A	230501302002435	Rp32,781,343
25	00264T	00264A	230501302002448	Rp34,707,098
26	00275T	00275A	230501302002529	Rp47,957,891
27	00301T	00301A	230501302002719	Rp42,065,186
28	00335T	00335A	230501302003000	Rp49,025,000
29	00345T	00345A	230501302003293	Rp49,895,474
30	00361T	00361A	230501302003408	Rp44,869,569
31	00362T	00362A	230501302003426	Rp48,043,258
32	00363T	00363A	230501302003418	Rp99,902,645
33	00407T	00407A	230501302003597	Rp39,581,300
34	00409T	00409A	230501302003924	Rp49,999,093
35	00417T	00417A	230501302004036	Rp27,620,512
36	00437T	00437A	230501302004102	Rp99,997,608
37	00441T	00441A	230501302004150	Rp50,000,000
38	00442T	00442A	230501302004151	Rp30,133,006
39	00452T	00452A	230501302004447	Rp45,708,851
40	00457T	00457A	230501302004448	Rp42,716,610
41	00488T	00488A	230501302004624	Rp99,965,797
42	00509T	00509A	230501302004918	Rp48,505,732
43	00523T	00523A	230501302004986	Rp89,478,948
44	00524T	00524A	230501302005028	Rp49,858,114
45	00539T	00539A	230501302005283	Rp32,364,729
46	00552T	00552A	230501302005543	Rp28,471,727
47	00573T	00573A	230501302005671	Rp32,689,373
48	00580T	00580A	230501302005724	Rp44,164,197

49	00592T	00592A	230501302005946	Rp45,403,558
50	00597T	00597A	230501302005947	Rp99,654,183
51	00598T	00598A	230501302005966	Rp37,976,996
52	00619T	00619A	230501302006280	Rp99,963,905
53	00628T	00628A	230501302006520	Rp35,976,845
54	00649T	00649A	230501302006619	Rp49,619,814
55	00657T	00657A	230501302006716	Rp47,021,100
56	00661T	00661A	230501302006776	Rp68,022,853
57	00670T	00670A	230501302007012	Rp48,590,976
58	00674T	00674A	230501302007087	Rp37,521,862
59	00680T	00680A	230501302007036	Rp49,923,878
60	00690T	00690A	230501302007138	Rp99,931,403
61	00717T	00717A	230501302007484	Rp99,997,019
62	00722T	00722A	230501302007542	Rp28,785,880
63	00730T	00730A	230501302007634	Rp49,567,263
64	00736T	00736A	230501302007742	Rp44,436,389
65	00738T	00738A	230501302007743	Rp43,382,541
66	00740T	00740A	230501302007870	Rp49,209,980
67	00742T	00742A	230501302008074	Rp49,999,800
68	00748T	00748A	230501302008161	Rp49,622,880
69	00760T	00760A	230501302008268	Rp55,435,093
70	00768T	00768A	230501302008391	Rp49,999,820
71	00775T	00775A	230501302008463	Rp26,894,504
72	00777T	00777A	230501302008465	Rp48,379,500
73	00780T	00780A	230501302008464	Rp48,223,438
74	00783T	00783A	230501302008530	Rp99,947,140
75	00793T	00793A	230501302008586	Rp35,037,934
TOTAL				Rp.4,113,065,837,-

Berbeda dengan GUP Tunai, GUP KKP tidak terdapat ketentuan jumlah minimal dalam melakukan penggantian uang persediaan/revolving. Berikut merupakan realisasi dari Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah Bawaslu Provinsi Gorontalo sampai Agustus Tahun 2023.

No	No. SPP & SPM	Tanggal SPP	Tanggal SPM	No. SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SP2D
----	---------------	-------------	-------------	----------	--------------	------------

1	00097T dan 00097A	13 Februari 2023	13 Februari 2023	23050130 2000706	13 Februari 2023	Rp47.038.328
2	00116T dan 00116A	17 Februari 2023	17 Februari 2023	23050130 2000881	20 Februari 2023	Rp52.633.942
3	00171T dan 00171A	3 Maret 2023	6 Maret 2023	23050130 2001440	6 Maret 2023	Rp66.256.659
4	00219T dan 00219A	16 Maret 2023	16 Maret 2023	23050130 2001999	17 Maret 2023	Rp64.697.890
5	00299T dan 00299A	5 April 2023	5 April 2023	23050130 2002646	6 April 2023	Rp67.182.627
6	00378T dan 00378A	2 Mei 2023	3 Mei 2023	23050130 2003534	4 Mei 2023	Rp47.111.710
7	00516T dan 00516A	6 Juni 2023	6 Juni 2023	23050130 2004814	6 Juni 2023	Rp68.553.651
8	00550T dan 00550A	15 Juni 2023	15 Juni 2023	23050130 2005412	16 Juni 2023	Rp11.765.368
9	00554T dan 00554A	19 Juni 2023	19 Juni 2023	23050130 2005550	21 Juni 2023	Rp78.369.959
10	00603T dan 00603A	27 Juni 2023	4 Juli 2023	23050130 2006104	4 Juli 2023	Rp28.139.020
11	00658T dan 00658A	14 Juli 2023	14 Juli 2023	23050130 2006717	17 Juli 2023	Rp22.092.121
12	00659T dan 00659A	17 Juli 2023	17 Juli 2023	23050130 2006764	17 Juli 2023	Rp94.129.332
13	00694T dan 00694A	31 Juli 2023	31 Juli 2023	23050130 2007212	1 Agustus 2023	Rp25.953.922
14	00711T dan 00711A	3 Agustus 2023	4 Agustus 2023	23050130 2007483	4 Agustus 2023	Rp7.416.044
15	00739T dan 00739A	10 Agustus 2023	11 Agustus 2023	23050130 2007859	14 Agustus 2023	Rp66.475.890

16	00753T dan 00753A	22 Agustus 2023	22 Agustus 2023	23050130 2008205	23 Agustus 2023	Rp39.205.643
17	00784T dan 00784A	30 Agustus 2023	30 Agustus 2023	23050130 2008531	1 Septemb er 2023	49.483.155
Total Realisasi						Rp. 836.505.261,-

3) Rekening Dana Pemilu (RDP)

Rekening Dana Pemilu yang selanjutnya disingkat dengan RPD adalah rekening pemerintah lainnya pada Bawaslu Kabupaten/Kota untuk menampung dana Pemilu yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan pada Badan Adhoc Penyelenggaran Pemilu. Sehubungan dengan Peraturan Menteri Keuangan No.181/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Tahapan Pemilihan Umum, Bawaslu Provinsi Gorontalo telah mengajukan LS RDP untuk keperluan Operasional Pemilu. Bawaslu Provinsi Gorontalo sampai dengan bulan Agustus Tahun 2023 telah mengajukan SPM LS RDP sebanyak 21 SPM dengan total SPM sebesar **Rp10.884.181.389,-**.

Untuk Realisasi Belanja Modal (53) di Bawaslu Provinsi Gorontalo hingga Agustus Tahun 2023 adalah sebesar Rp.135,050,00,-. Hingga Agustus Tahun 2023 Pembelian Peralatan dan Mesin untuk Bawaslu Provinsi Gorontalo sebagai berikut:

- i. Sofa 2 unit = Rp.25,750,000,-
- ii. Kursi Pimpinan 6 unit = Rp.24.000,000,-
- iii. Kursi Rapat Pimpinan 6 unit = Rp.18,000,000,-
- iv. AC 1 unit = Rp.8,300,000,-
- v. PC All In One 1 unit = Rp.15,000,000,-
- vi. Laptop 2 unit = Rp.44.000,000,-

d. Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) oleh Kementerian Keuangan sampai dengan 31 Agustus Tahun 2023 di Lingkungan Bawaslu Provinsi Gorontalo disampaikan sebagai berikut:

Kode Satker	Satker	Nilai IKPA
686438	Sekretariat Bawaslu Provinsi Gorontalo	94.00

2. Permasalahan

- a. Kegiatan yang tidak sesuai pola target penyerapan periodik;
- b. Keterbatasan personel sehingga menghambat proses pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran;
- c. Kegiatan tidak dapat dilakukan karena masih menunggu petunjuk teknis dari Eselon I.
- d. Satker Bawaslu Provinsi Gorontalo telah mengalami kekurangan anggaran pada berbagai komponen kegiatan yaitu pada komponen kegiatan Gaji Pegawai, Honorarium Pengawas Ad-Hoc, Sewa Gedung Kantor Pengawas Ad-Hoc, Operasional Kantor Pengawas Ad-Hoc dengan rincian kebutuhan sebagai berikut:
 - Satker Bawaslu Provinsi Gorontalo telah mengidentifikasi kekurangan kebutuhan anggaran belanja pegawai sebesar **Rp2.219.269.000,-**;
 - Satker Bawaslu Provinsi Gorontalo telah mengidentifikasi kekurangan kebutuhan anggaran Honorarium Pengawas Ad-Hoc sebesar **Rp5.383.600.000,-**;
 - Satker Bawaslu Provinsi Gorontalo telah mengidentifikasi kekurangan kebutuhan anggaran Sewa Gedung Kantor Pengawas Ad-Hoc sebesar **Rp1.535.400.000,-**;

- Satker Bawaslu Provinsi Gorontalo telah mengidentifikasi kekurangan kebutuhan anggaran Operasional Kantor Pengawas Ad-Hoc sebesar **Rp759.960.000,-**.
- e. Bawaslu Provinsi Gorontalo telah melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Anggaran Biaya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 Bawaslu Provinsi Gorontalo pada tanggal 10 Juli Tahun 2023 dan Pertanggal 31 Juli Tahun 2023 sudah masuk dana hibah pada Rekening Penampung Hibah sebesar 40% dari total Anggaran sebesar Rp. 24,126,132,000,-.
3. Rencana Tindak Lanjut
 - a. Melakukan revisi kalender kegiatan (timeline) dan penyesuaian perencanaan program/kegiatan;
 - b. Kolaborasi atau bekerjasama dengan bagian lain agar lebih maksimal dalam pelaksanaan kegiatan dan tercapainya percepatan realisasi;
 - c. Mengidentifikasi kegiatan dan melakukan koordinasi dengan Bawaslu RI dan menyampaikan kebutuhan yang jelas terkait petunjuk yang dibutuhkan agar kegiatan dapat dilanjutkan tanpa hambatan pada periode yang akan datang.
 - d. Program pengembangan pengawasan partisipatif menjadi salah satu program nasional, dan menjadi program unggulan di Bawaslu Kabupaten Boalemo. Program ini melibatkan para pemangku kepentingan yang potensial menjadi penggerak pengawasan partisipatif di daerah. Untuk itu, sebaiknya penganggaran untuk program ini agar lebih di Optimalkan.
 - e. Terdapat sejumlah kegiatan teknis di Bawaslu Kabupaten Boalemo yang membutuhkan keterlibatan pihak eksternal. Namun kurang didukung oleh ketersediaan anggaran yang memadai. Untuk itu, sebaiknya program/kegiatan yang memungkinkan pemanfaatan tenaga eksternal terakomodasi dalam penganggaran DIPA Bawaslu.
 - f. Satker Bawaslu Provinsi Gorontalo telah menyampaikan kekurangan anggaran kepada Biro Perencanaan dan Organisasi Bawaslu Republik Indonesia.

C. Barang Milik Negara (BMN)

1. Analisis Data (Data Sarana berupa Gedung Kantor dan Prasarana berupa Peralatan Kantor Beserta Kondisi dan Analisa Kebutuhan)

Bawaslu Provinsi Gorontalo saat ini menempati Gedung Pinjam Pakai dari Pemerintah Provinsi Gorontalo sampai dengan tahun 2025. Gedung saat ini dalam kondisi rusak ringan dan perlu dilakukan perbaikan di berbagai ruangan di dalam gedung kantor. Saat ini Komisioner dan Kepala Sekretariat, Kepala Bagian, serta staf terpenuhi untuk kebutuhan ruangan kerja. Termasuk juga untuk Ruang Sidang yang merangkap sebagai Ruang Rapat. Untuk Barang Milik Negara secara umum telah terpenuhi kebutuhan namun perlu dilakukan peremajaan terhadap BMN yang sudah dianggap ketinggalan jaman. Beberapa BMN juga perlu dilakukan perawatan dan perbaikan secara berkala untuk dapat menunjang pekerjaan sehingga anggaran perawatan dan perbaikan sangat penting untuk terus bertambah dari tahun ke tahun.

Pada Tahun 2023 Bawaslu Kota Gorontalo memperoleh Gedung Pinjam pakai dari Pemerintah Kota Gorontalo yang beralamatkan di Jln Taman Bunga, Kelurahan Moodu, Kecamatan Kota Timur. Kondisi gedung masih membutuhkan perbaikan dan tambahan ruangan, seperti belum tersedianya ruangan Rapat dan Ruangan untuk Sidang.

2. Permasalahan
 - a. Kantor Bawaslu Provinsi Gorontalo yang masih berstatus Pinjam Pakai;
 - b. Terdapat banyak BMN yang perlu dilakukan peremajaan dikarenakan sudah tidak mampu untuk digunakan dalam bekerja;
 - c. Anggaran Pemeliharaan BMN tidak mencukupi kebutuhan perawatan dan perbaikan BMN di kantor Bawaslu Prov. Gorontalo.
 - d. Belum tersedianya anggaran untuk perbaikan gedung pada Bawaslu Kota Gorontalo.

- e. Belum tersedianya anggaran untuk penambahan ruangan Sidang dan Rapat pada Bawaslu Kota Gorontalo.
 - f. Karena belum menjadi Satker maka Bawaslu Kota Gorontalo terkendala dengan Pengadaan Barang dan Jasa Penunjang pekerjaan.
3. Rencana Tindak Lanjut
- a. Mengajukan permohonan pembangunan Gedung Kantor atas Tanah Hibah Bawaslu Provinsi Gorontalo kepada Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Bawaslu Republik Indonesia;
 - b. Membuat usulan anggaran peremajaan terhadap BMN yang masih dapat dilakukan pengembangan, serta melakukan penghapusan terhadap BMN yang sudah tidak dapat lagi dilakukan perbaikan maupun peremajaan;
 - c. Melakukan pengusulan tambahan anggaran perawatan dan perbaikan bagi BMN yang perlu dilakukan perawatan berkala seperti AC, Printer, dll.
 - d. Dalam hal ini Bawaslu Kota Gorontalo sudah melakukan konsultasi dengan BMN Bawaslu Provinsi Gorontalo, terkait dengan kekurangan Sarana dan Prasarana serta Peralatan Kantor Penunjang pekerjaan.

D. Hukum Bidang Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK)

1. Analisis Data (Pengelolaan JDIH. Sosialisasi terkait Surat Edaran. Perbawaslu. dst)
 Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat. Pada pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 (Perpres 33/2012) tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang selanjutnya disingkat JDIHN adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat. Oleh karena itu keberadaan JDIH Bawaslu merupakan hal yang penting dalam pembangunan hukum nasional, penyelenggaraan pemerintahan, serta kehidupan berbangsa dan bernegara.
 Dalam pelaksanaan pengelolaan produk hukum dengan baik, Bawaslu bersama dengan jajaran dibawahnya melalui Peraturan Bawaslu Nomor 1 tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan, dilengkapi dengan perangkat organisasi yang melaksanakan fungsi pengelolaan dan pendokumentasian informasi hukum. Fungsi tersebut selama ini dilaksanakan melalui JDIH Bawaslu yang memanfaatkan teknologi informasi, oleh Pusat JDIH Bawaslu RI dan Anggota JDIH Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
 Dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam JDIH Bawaslu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan. Oleh karenanya menjaga standar kualitas pengelolaan JDIH Bawaslu akan menjaga standar kualitas dan menjadikan produk hukum di Bawaslu otentik, utuh dan terpercaya, sehingga dapat mencapai Visi dan misi yang sebelumnya telah dijabarkan dan tentunya dapat membantu meningkatkan nilai reformasi birokrasi terutama di Area Penataan Peraturan Perundang-Undangan.
 Bawaslu Provinsi Gorontalo dalam pengelolaan JDIH mempedomani Surat Edaran Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pengelolaan Jaringan Dokumentasi yang menjadi acuan kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam

meningkatkan kegiatan pengelolaan JDIH Bawaslu dengan memperhatikan standar pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Perbawaslu 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pendokumentasian informasi hukum yang terintegrasi untuk mendukung kinerja pencegahan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel.

a) Struktur Tim Pengelola JDIH Bawaslu Provinsi Gorontalo

Bahwa dalam rangka terlaksananya pengelolaan JDIH yang secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat, maka dalam hal ini Bawaslu Provinsi Gorontalo membentuk struktur tim pengelola JDIH di lingkungan Bawaslu Provinsi Gorontalo berdasarkan Surat Keputusan Bawaslu Provinsi Gorontalo Nomor : 080/HK.01.01/K/10/2022 yakni sebagai berikut:

Tabel Pengelola JDIH Bawaslu Provinsi Gorontalo

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Idris Usuli	Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo	Pembina
2.	Lismawy Ibrahim	Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo	Pembina
3.	John Hendri Purba	Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo	Pembina
4.	Amin Abdullah	Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo	Pembina
5.	Moh Vadzry Arsyad	Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo	Pembina
6.	Nikson Entengo	Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo	Penanggung Jawab
7.	Yusnandar Karim	Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa.	Ketua
8.	Rahadian Herlangga Wisnu W.	Koordinator Bagian Hukum dan Penyelesaian Sengketa Proses.	Sekretaris
9.	Johan Robbi Mahfuz Z.	Analisis Hukum Ahli Pertama	Anggota
10.	Moh. Adib Mustofa	Pelaksana Bagian Hukum dan Penyelesaian Sengketa Proses	Anggota

Gambar : SK Nomor: 080/H.K.01.01/K/10/2022



b) Ruang JDIH Bawaslu

Dalam menunjang pengelolaan produk hukum Bawaslu, Bawaslu Provinsi Gorontalo menyediakan ruangan khusus untuk Pengelolaan JDIH yang bertempat di Kantor Bawaslu Bawaslu Provinsi Gorontalo.



Keterangan

- 1) Ruang Khusus JDIH
- 2) Perpustakaan
- 3) Fasilitas Ruang JDIH
- 4) Ruang Operator JDIH

c) Pengelolaan Dokumen Hukum Bawaslu Provinsi Gorontalo

Bawaslu Provinsi Gorontalo dalam pengelolaan JDIH melakukan pembaharuan (update) jumlah koleksi dokumen hukum pada JDIH Bawaslu setiap saat, dengan jenis dokumen hukum berupa:

- 1) Putusan Penyelesaian Sengketa;
- 2) Surat Keputusan;
- 3) Surat Edaran;
- 4) Nota Kesepahaman;
- 5) Perjanjian Kerja Sama;
- 6) Imbauan.

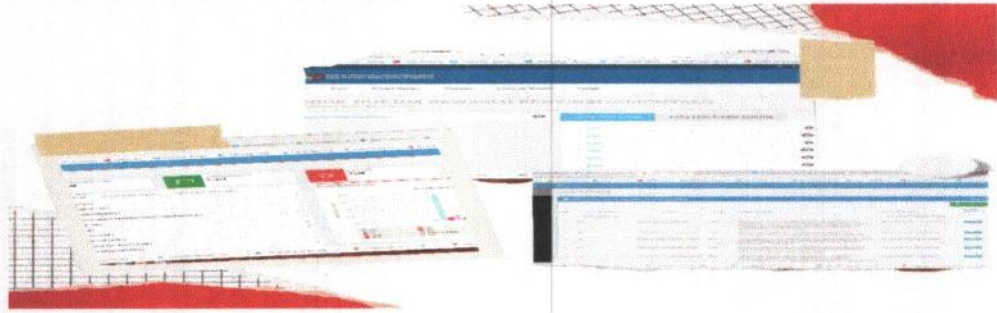


Sebelum melakukan unggah dokumen hukum Bawaslu Provinsi Gorontalo pada JDIH Bawaslu, terlebih dahulu berdasarkan Surat Edaran Nomor 28 Tahun 2022 yaitu :

- 1) Menyusun abstrak produk hukum yang diunggah pada JDIH, bahwa abstrak yang disusun berlaku hanya untuk dokumen hukum jenis putusan.
- 2) Memberikan tanda dalam kertas (watermark) pada dokumen Hukum yang diunggah ke dalam sistem JDIH Bawaslu, bahwa sebelum dokumen yang akan diunggah ke dalam JDIH Bawaslu, terlebih dahulu memberikan tanda watermark dengan tujuan untuk melindungi hak cipta atau copyright sebuah karya. Dengan adanya watermark publik mengetahui bahwa karya tersebut benar-benar milik Bawaslu Provinsi Gorontalo. Jadi, tidak ada orang lain yang berhak menyatakan bahwa karya

tersebut adalah milik mereka. Pemberian watermark dengan ketentuan (ukuran huruf 12 jenis huruf arial dan pojok kiri dan kanan bawah dokumen dari halaman 2 sampai dengan seterusnya terdapat penggunaan kata jdih//bawaslu.go.id dan Bawaslu Provinsi Gorontalo menggunakan warna huruf biru.

- 3) Jumlah Dokumen Hukum Bawaslu Provinsi Gorontalo yang telah diunggah pada JDIH Bawaslu sebanyak 78 dokumen hukum yang terdiri dari Putusan Penyelesaian Sengketa sebanyak 2, Putusan Penanganan Pelanggaran Administrasi sebanyak 4, Putusan Pidana Pemilu sebanyak 1, Perjanjian Kerjasama Sebanyak 13, Nota Kesepahaman Sebanyak 2, Surat Keputusan sebanyak 56 Dokumen.



- 4) Sosialisasi JDIH Bawaslu Provinsi Gorontalo dilakukan melalui Media Sosial (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, Tiktok), tujuan agar masyarakat lebih mudah dan cepat untuk menerima informasi karena dengan media sosial bisa menjadi sarana sosialisasi yang murah dan efektif bagi instansi pemerintah khususnya lembaga Bawaslu, Bawaslu Provinsi sampai dengan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mensosialisasikan produk hukum Bawaslu. Berikut media sosial JDIH Bawaslu Provinsi Gorontalo



2. Permasalahan

- a) Anggaran Divisi Hukum setiap tahunnya tidak dapat mengakomodir untuk dilakukannya Sosialisasi seluruh Peraturan Bawaslu dan Produk Hukum Non Peraturan Bawaslu sehingga setiap tahun kegiatan sosialisasi terkait Produk Hukum Non Peraturan Bawaslu dan Peraturan Bawaslu menjadi sangat terbatas.
- b) Kurangnya Personil SDM Divisi Hukum yang menjadi Hambatan Divisi Hukum dalam melakukan (Program Pengelolaan JDIH, Sosialisasi terkait Surat Edaran, Perbawaslu dsb).
- c) Pengelolaan Dokumen Hukum masih belum teratur dikarenakan kurangnya Personil di Divisi Hukum.

- d) Sarana Prasarana yang belum memadai, di Divisi Hukum belum ada Komputer dan Scanner yang khusus digunakan untuk mengelola Dokumen Hukum yang akan di Upload di JDIIH.
3. Rencana Tindak Lanjut
- a) Memanfaatkan resource yang ada di Divisi Hukum se-efisien mungkin. Meskipun dengan segala keterbatasan yang ada di Divisi Hukum dengan adanya pembagian Tugas secara tepat akan memudahkan prosedur pengelolaan JDIIH di Bawaslu Provinsi Gorontalo.
 - b) Melakukan Pengajuan terhadap Pengadaan Laptop kantor, Scanner, dan Lemari untuk Mengelola Dokumen Hukum Bawaslu Provinsi Gorontalo.

E. Pengelolaan Data dan Informasi (Datin)

1. Analisis Data (Pengelolaan Website PPID)

Tanggal 18 bulan juli 2023 Data dan informasi (Datin) telah melaksanakan/berpartisipasi dalam penguatan kelembagaan berupa kegiatan sosialisasi monev keterbukaan informasi publik Bawaslu Provinsi tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Bawaslu secara daring. Tanggal 24 s.d 25 juli Mengikuti Kegiatan Transfer Knowledge Software Devined Wide Area Network (SD-WAN) yang dilaksanakan di Jakarta kemudian Bawaslu memberikan Sangfor kepada Bawaslu Provinsi yang kegunaannya adalah untuk security jaringan serta untuk mengakses data kependudukan di kementerian dalam negeri alat sangfor tersebut sudah terpasang dan aktif hanya tinggal menunggu petunjuk penggunaannya.

Selang semester I (satu) Data dan informasi telah melaksanakan/berpartisipasi dalam penguatan kelembagaan Datin kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan tersebut antara lain : tentang mengikuti Rapat Penyusunan Instrument Monev Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Bawaslu Kabupaten/Kota tahun 2023 (luring), Sosialisasi Monev Keterbukaan Informasi Public (KIP) bagi Bawaslu Kabupaten Kota (daring) Monitoring dan Sosialisasi Monev Keterbukaan Informasi Public (KIP) (luring), Sosialisasi Tata Cara Penggunaan Aplikasi SAQ dalam penilaian Layanan Informasi Publik (KIP) bagi Bawaslu Kabupaten/Kota (luring), Monitoring Evaluasi Penggunaan Aplikasi SAQ di Bawaslu Kabupaten/Kota (daring), Sosialisasi Keamanan dan Kebersihan Siber dilingkungan Bawaslu (luring), Rapat Evaluasi Pelaksanaan Monev Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Public (KIP)(luring), Mengikuti Kegiatan Transfer Knowledge Software Devined Wide Area Network (SD-WAN).

Tim Data dan Informasi Bawaslu Provinsi telah mengupload dokumen permintaan dari Bawaslu Republik Indonesia melalui Pusdatin RI telah mengupload dokumen permintaan dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Bawaslu Republik Indonesia terkait penilaian Keterbukaan Informasi Publik. Langkah ini menunjukkan komitmen dari Bawaslu Provinsi Gorontalo untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyediaan informasi publik kepada masyarakat. Dokumen permintaan yang diunggah ini berisi data dan informasi terkait tugas dan fungsi Bawaslu Provinsi Gorontalo, laporan kegiatan, anggaran, serta segala hal yang dapat memberikan gambaran tentang keterbukaan informasi di Bawaslu Provinsi Gorontalo.

2. Permasalahan

Terhadap pengelolaan website PPID yang merupakan penyedia layanan informasi publik di Bawaslu Provinsi Gorontalo maupun Bawaslu Kabupaten/Kota terdapat kendala sebagai berikut :

- a) Tidak semua SDM yang memiliki basik IT dalam Pengelolaan Data dan Informasi baik di Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten/Kota.
- b) Perlu dilakukan penguatan secara kontinyu dan konsisten terhadap pemahaman SDM Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota bahwa Informasi adalah merupakan

hak dasar dari masyarakat untuk mendapatkan informasi sehingga harus selalu tersedia secara berkala.

- c) Server Website Kabupaten/Kota yang sering error/maintenance serta tidak aman dari serangan Hacker.
 - d) Setiap hari signal tidak stabil sehingga menyebabkan terganggunya kerja-kerja lembaga ditambah lagi dengan struktur gedung Bawaslu Provinsi 3 (tiga) lantai.
3. Rencana Tindak Lanjut
- a) Memasukkan anggaran khusus pembaharuan alat dan jaringan internet pada perencanaan anggaran tahun 2024
 - b) Meningkatkan kapasitas pengelola layanan Data dan Informasi di Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota
 - c) Memasang Sangfor/alat security jaringan yang telah di berikan oleh Bawaslu RI (Pusdatin).

F. Pengelolaan Hubungan Masyarakat (Humas)

1. Analisis Kehumasan

Pengelolaan kehumasan berfokus pada 2(dua) hal yaitu pengelolaan publikasi berita melalui website dan pengelolaan media sosial melalui Facebook, Instagram, Twitter, Tiktok, dan Youtube.

Pada bulan Juli divisi humas telah melaksanakan dan mengikuti beberapa kegiatan dalam rangka meningkatkan publikasi dan dokumentasi Lembaga Bawaslu. Adapun ringkasanya adalah sebagai berikut:

a) Pengelolaan Media Sosial

• Instagram

Selama periode 1 - 31 Juli 2023, total unggahan di Instagram @bawaslugorontalo berjumlah 78 unggahan. Jumlah followers instagram pada bulan ini naik dari 2.034 menjadi 2.067, dimana bertambah sebanyak 33 orang. Dari keseluruhan unggahan berhasil menarik perhatian jangkauan sebanyak 2.908 akun.

Selama periode 1 - 31 Agustus 2023, total unggahan di Instagram @bawaslugorontalo berjumlah 75 unggahan. Jumlah followers instagram pada bulan ini naik dari 2.067 menjadi 2.102, dimana bertambah sebanyak 45 orang. Dari keseluruhan unggahan berhasil menarik perhatian jangkauan sebanyak 2.149 akun.

• Facebook

Selama periode 1 - 31 Juli 2023, total unggahan di Facebook @bawaslugorontalo berjumlah 78 unggahan. Jumlah pengikut Facebook pada bulan ini naik dari 2.495 menjadi 2.526, dimana bertambah sebanyak 31 orang. Dari keseluruhan unggahan berhasil menarik perhatian jangkauan sebanyak 4.142 akun.

Selama periode 1 - 31 Agustus 2023, total unggahan di Facebook @bawaslugorontalo berjumlah 75 unggahan. Jumlah pengikut Facebook pada bulan ini naik dari 2.526 menjadi 2.595, dimana bertambah sebanyak 69 orang. Dari keseluruhan unggahan berhasil menarik perhatian jangkauan sebanyak 5.199 akun.

• Twitter

Selama periode 1 - 31 Juli 2023, total unggahan di Twitter @bawaslugtlo berjumlah 78 unggahan. Jumlah pengikut Twitter pada bulan ini naik dari 247 menjadi 248, dimana bertambah sebanyak 1 orang. Dari keseluruhan unggahan berhasil menarik perhatian jangkauan sebanyak 2.206 akun.

Selama periode 1 - 31 Agustus 2023, total unggahan di Twitter @bawaslugtlo berjumlah 75 unggahan. Jumlah pengikut Twitter pada bulan ini

naik dari 248 menjadi 255, dimana bertambah sebanyak 7 orang. Dari keseluruhan unggahan berhasil menarik perhatian jangkauan sebanyak 1.632 akun.

- Tiktok

Selama periode 1 - 31 Juli 2023, total unggahan di Tiktok @bawaslugorontalo berjumlah 9 unggahan. Jumlah pengikut Tiktok pada bulan ini naik dari 834 menjadi 868, dimana bertambah sebanyak 34 orang. Dari keseluruhan unggahan berhasil menarik perhatian tayangan sebanyak 2.165 akun.

Selama periode 1 - 31 Agustus 2023, total unggahan di Tiktok @bawaslugorontalo berjumlah 9 unggahan. Jumlah pengikut Tiktok pada bulan ini naik dari 868 menjadi 913, dimana bertambah sebanyak 45 orang. Dari keseluruhan unggahan berhasil menarik perhatian tayangan sebanyak 2.465 akun.

- Youtube

Selama periode 1 - 31 Juli 2023, total unggahan di Youtube Bawaslu Gorontalo berjumlah 9 unggahan. Jumlah pengikut Youtube pada bulan ini naik dari 348 menjadi 366, dimana bertambah sebanyak 34 orang. Dari keseluruhan unggahan berhasil menarik perhatian tayangan sebanyak 5.600 penayangan.

Selama periode 1 - 31 Agustus 2023, total unggahan di Youtube Bawaslu Gorontalo berjumlah 4 unggahan. Jumlah pengikut Youtube pada bulan ini naik dari 366 menjadi 377, dimana bertambah sebanyak 11 orang. Dari keseluruhan unggahan berhasil menarik perhatian tayangan sebanyak 1.314 penayangan.

- b) Pengelolaan Berita Website

Selama Periode 1 – 31 Juli 2023, total dilihat halaman adalah 24.084 kali, dengan total pengunjung website sebanyak 2.857 orang.

Selama Periode 1 – 31 Agustus 2023, total dilihat halaman adalah 24.027 kali, dengan total pengunjung website sebanyak 2.677 orang.

- 2. Permasalahan

- a) Kurangnya Sarana dan prasarana Kehumasan sehingga memiliki keterbatasan dalam mengambil gambar dan video.
- b) Jumlah tenaga SDM tidak sebanding dengan jumlah kegiatan yang diharuskan untuk dibuat konten dan berita.

- 3. Rencana Tindak Lanjut

- a) Memaksimalkan Penggunaan Perangkat yang ada.
- b) Menggunakan Tenaga Teknis di masing-masing Divisi sebagai pencatatan berita kegiatan yang dilaksanakan agar berita dan konten bisa di upload dengan cepat dan akurat.

Lampiran Laporan Kinerja

A. Aspek Kepegawaian SDM

1. Data Umum Kepegawaian PNS Bawaslu Provinsi Gorontalo

NO	NAMA	NIP	STATUS		PANGKAT/GOJOL	PANGKAT/GOJOLAN	TMT	PENDIDIKAN TERAKHIR	JABATAN	RUMAH AT DIKLAT PIM	TMT GAJI BERKALA	PEJABAT PENANDATANGAN GAJI BERKALA TERAKHIR
			ORGANIK	DKR								
1	NIKSON ENTENGO	197911222002121008	ORGANIK		IV/b	01-04-2021	S-2 PENGELOLAAN SUMBER DAYA PEMBANGUNAN	STRUKTURAL	SPAMEN/SESPA/SESPAN AS DIKLAT PIM TK. II	01-12-2021	SEKRETARIS JENDERAL	
2	FERDY RUS MODANGGU	196907172002121007	ORGANIK		III/d	01-10-2012	S-1 SOSIAL POLITIK	STRUKTURAL	SEPALA/ADUM/DIKLAT PIM TK.IV	01-12-2022	SEKRETARIS JENDERAL	
3	YUSNANDAR KARIM	197801202002121008	ORGANIK		III/d	01-04-2017	S-1 HUKUM ISLAM	STRUKTURAL	SEPALA/ADUM/DIKLAT PIM TK.IV	01-10-2022	SEKRETARIS JENDERAL	
4	ADMIRA NURINDAH NINGRUM WANTOGIA	197804152006042027	ORGANIK		III/d	01-10-2016	S-1 EKONOMI MANAJEMEN KELOMPOK DAN PERBANKAN	STRUKTURAL	SEPALA/ADUM/DIKLAT PIM TK.IV	01-01-2021	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
5	MUHAMMAD IKRAR RAUF	198411302022031007	ORGANIK		III/a	01-03-2022	S-1 ILMU HUKUM	JFT	-	-	-	
6	SITTYANTI S. PAKAYVA	197605132009012002	ORGANIK		III/d	01-04-2022	S-1 MIPA KOMPUTER DAN SISTEM INFORMATIKA	JFT	SEPALA/ADUM/DIKLAT PIM TK.IV	01-01-2021	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
7	ISNAWATI M MARRUN	198103092009012003	ORGANIK		III/d	01-04-2022	S-1 ADMINISTRASI	JFT	SEPALA/ADUM/DIKLAT PIM TK.IV	01-01-2021	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
8	ISWAN MAKSUM	198210222008021001	ORGANIK		III/c	01-10-2019	S-2 ADMINISTRASI PUBLIK	JFT	SEPALA/ADUM/DIKLAT PIM TK.IV	01-02-2022	SEKRETARIS JENDERAL	
9	JOHAN ROHH MAHFUS ZHAHRI	199610252019021002	ORGANIK		III/a	01-02-2019	S-1 ILMU HUKUM	JFT	-	01-02-2023	SEKRETARIS JENDERAL	
10	NURUL FAIZIAH	200005152022012006	ORGANIK		III/c	01-01-2022	D-III AKUNTANSI	JFT	-	-	-	
11	NADILA DWI CAHYANI	199907202022012002	ORGANIK		III/c	01-01-2022	D-III AKUNTANSI	JFT	-	-	-	
12	DEDI SUSANTO	198011102011011001	ORGANIK		III/a	01-04-2020	S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA	JFU	-	01-01-2022	SEKRETARIS JENDERAL	
13	YOLANDA NON RUSBIN	198312142019022001	ORGANIK		III/d	01-04-2023	D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN	JFU	-	01-02-2023	SEKRETARIS JENDERAL	
14	NENENG WIDASARI	199101262020122007	ORGANIK		III/a	01-12-2020	S-1 ILMU HUKUM	JFU	-	01-12-2022	SEKRETARIS JENDERAL	
15	IRA PERVAITASARI	199101262020122005	ORGANIK		III/a	01-12-2020	S-1 MANAJEMEN	JFU	-	01-12-2022	SEKRETARIS JENDERAL	
16	DONNY HANGGORO HANGGOWO MUKTI	199103262020121004	ORGANIK		III/b	01-12-2020	S-1 MATEMATIKA	JFU	-	01-12-2022	SEKRETARIS JENDERAL	
17	RAHMAN HERLANGGA WISNU WARDIHANA	199203082019021002	ORGANIK		III/b	01-04-2023	S-1 ILMU HUKUM	JFU	-	01-02-2023	SEKRETARIS JENDERAL	
18	CHAIRUL RIZAL GOBEL	199204162019021003	ORGANIK		III/b	01-04-2023	S-1 ILMU HUKUM	JFU	-	01-02-2023	SEKRETARIS JENDERAL	
19	MUH. ADIB MUSTOFA	199504032020121004	ORGANIK		III/a	01-12-2020	S-1 ILMU HUKUM	JFU	-	01-12-2022	SEKRETARIS JENDERAL	
20	RATU VIDYA NUR ANI	199511202020122007	ORGANIK		III/a	01-12-2020	S-1 ILMU PEMERINTAHAN	JFU	-	01-12-2022	SEKRETARIS JENDERAL	
21	RIFKY HERMAWAN SAMAD	199603222020121003	ORGANIK		III/a	01-12-2020	S-1 ILMU PEMERINTAHAN	JFU	-	01-12-2022	SEKRETARIS JENDERAL	
22	REYNALDY YUWALINEN PRADANA	199608062019021001	ORGANIK		III/b	01-04-2023	S-1 SISTEM INFORMASI	JFU	-	01-02-2023	SEKRETARIS JENDERAL	
23	SYARIF ALI KHAN	199706122022031003	ORGANIK		III/a	01-03-2022	S-1 ILMU POLITIK	JFU	-	-	-	
24	BAMBANG UBRISI	198107032006041011			III/b	01-04-2013	S-1 PENDIDIKAN AKUNTANSI	JFU	-	01-04-2014	KARUPATEN BOALEMO	
25	MUH. TAUCIK MASE	198310182011011001			III/b	01-04-2018	S-1 SISTEM INFORMASI	JFU	-	01-01-2021	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	

2. Data Umum Kepegawaian PPNNP Bawaslu Provinsi Gorontalo

NO	NAMA	NOMOR IDENTITAS PEGAWAI (NIK)	GELAR	JABATAN	PENDIDIKAN	MASA KERJA
1	DIDIT SUHANDONO	3578091201820001	S.H	PROV.B-BAGIAN PENANGGARAN PELANGGARAN, PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU, DAN HUKUM - STAF PENANGGARAN PELANGGARAN	S-1 ILMU HUKUM	4 TAHUN 6 BULAN
2	ARMIN NUR	7111012303930003	S.H	PROV.B-BAGIAN PENGAWASAN PEMILU DAN HUBUNGAN MASYARAKAT - STAF HUMAS	S-1 HUKUM	5 TAHUN 1 BULAN
3	IBNU A. LAWANI	7171062812930001	-	PROV.B-BAGIAN ADMINISTRASI - STAF PERENCANAAN	SMK	5 TAHUN 10 BULAN
4	ACHMAD POLAMOLO	7501011002920002	S.E	PROV.B-BAGIAN ADMINISTRASI - STAF KEUANGAN	S-1 EKONOMI	5 TAHUN 10 BULAN
5	MUSTIKA HIDAYAT AL ANSHORI	7502041603910001	S.Komm	PROV.B-BAGIAN PENGAWASAN PEMILU DAN HUBUNGAN MASYARAKAT - STAF PENGAWASAN PEMILU	S-1 TEKNIK INFORMATIKA	6 TAHUN 10 BULAN
6	ADITYO SETIAWAN IBRAHIM	7503021001900001	S.AP	PROV.B-BAGIAN ADMINISTRASI - STAF BMN	S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA	8 TAHUN 6 BULAN
7	AWAN ABDULLAH	7503153008780001	-	PROV.B-BAGIAN ADMINISTRASI - STAF ARSIP DAN PERSURATAN	PAKET C	8 TAHUN 6 BULAN
8	AHMAD ALI	7571030711860001	S.Komm	PROV.B-BAGIAN PENGAWASAN PEMILU DAN HUBUNGAN MASYARAKAT - STAF DATIN	S-1 TEKNIK INFORMATIKA	5 TAHUN 10 BULAN
9	NORPIN AHMAD	7571062104840001	S.IP	PROV.B-BAGIAN ADMINISTRASI - STAF SDM	S-1 ILMU POLITIK	5 TAHUN 10 BULAN
10	ISMI FEBRINA MUSTAFA	7571084902940001	S.H	PROV.B-BAGIAN PENANGGARAN PELANGGARAN, PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU, DAN HUKUM - STAF PENANGGARAN PELANGGARAN	S-1 ILMU HUKUM	4 TAHUN 6 BULAN
11	CHALID IBRAHIM	7501012910680001	-	DRIVER	SGO	4 TAHUN 6 BULAN
12	RISNA RAHIM	7501016102780001	-	CLENNING SERVICE	MA	2 TAHUN 1 BULAN
13	TAUFIK BIAHIMO	7502010202480002	-	DRIVER	SMA	3 TAHUN 6 BULAN
14	SRI YOLANDA KASIM	7503016810900001	A.Md., Par	PRAMUSAJI	D-III ILMU PERHOTELAN	4 TAHUN 6 BULAN
15	NAZIR HARUN	7503062804890002	-	DRIVER	SMK	4 TAHUN 3 BULAN
16	ARIANTO LALYO	7503151408890001	S.H.	SECURTY	S-1 HUKUM	3 TAHUN 7 BULAN
17	REZA KALUKU	75710111712990002	-	DRIVER	SMA	4 TAHUN 0 BULAN
18	FERRIYANTO MOBI	7571021202910001	-	DRIVER	SMP	1 TAHUN 8 BULAN
19	ISRAFIEL KAI	7571030912960001	-	SECURTY	SMK	3 TAHUN 6 BULAN
20	BUDIYANTO BOLLIO	7571052206800004	-	DRIVER	SLTA	0 TAHUN 7 BULAN
21	USMAN AKUBA	7571032108890001	-	CLENNING SERVICE	SMP	4 TAHUN 6 BULAN
22	YAHYA A. WALINELO	7501180808930001	-	SECURTY	SMK	1 TAHUN 8 BULAN

B. Aspek Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)

1. Kondisi Prasarana Gedung Kantor

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Kesesuaian dengan Standar Luas Bangunan (dalam M2)	Kesesuaian Fungsi		Estimasi Kebutuhan Renovasi	Keterangan	
			Ruang Kerja Kasek dan Anggota	Ruang Rapat		Ketersediaan Ruang Sidang	Status Kepemilikan
1	Bawastu Provinsi Gorontalo	598 M2	Ada	Tidak Ada	69.496.000	Rusak Ringan	Pinjarm Pakai

2. Kondisi Sarana Peralatan Kantor

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Kondisi PC/Laptop/Notebook				Jumlah PC/Laptop/ Notebook	Kondisi Peralatan Kantor Lainnya			Jumlah Peralatan Kantor Lainnya	
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Penghapusan Aset		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat		
1	Bawastu Provinsi Gorontalo	47	0	17	0	64	361	0	69	0	430

3. Kebutuhan Sarana Peralatan Kantor pada Provinsi Gorontalo

No	Jumlah Eksisting Pegawai	Jumlah PC/Laptop/ Notebook Tersedia dengan Kondisi Baik dan Rusak Ringan (masih bisa dilakukan pemeliharaan)	Kekurangan PC/Laptop/Notebook	Estimasi Harga Pasar PC/Laptop/ Notebook (Rp) Per Unit	Jumlah Printer Tersedia dengan Kondisi Baik dan Rusak Ringan (masih bisa dilakukan pemeliharaan)	Kekurangan Printer/Scanner	Estimasi Harga Pasar Printer/Scanner (Rp) Per Unit
1	40	47	0	-	31	9	3.000.000

4. Pengguna Sarana Peralatan Kantor (PC/Laptop/ Notebook) pada Provinsi Gorontalo

No	Nama Pengguna Sarana Peralatan Kantor	PC/Laptop/ Notebook (Merk. Model. dan Tahun)	Printer/Scanner (Merk. Model. dan Tahun)
1	Idris Usuli, S.Pd., M.AP.	1. Acer Switch Alpha 12 Tahun 2018 2. Acer All In One - i5 - 1235U Tahun 2023	1. Epson L3110 Tahun 2019
2	Ahmad Abdullah, S.Ag	1. Acer Switch Alpha 12 Tahun 2018	
3	Amin Abdullah	1. Acer Aspire 5 - i5 Tahun 2022	1. Epson L360 Tahun 2017
4	Lismawy Ibrahim	1. Acer Aspire 5 - i5 Tahun 2022	
5	John Hendri Purba	1. Acer Aspire 5 - i5 Tahun 2022	
6	Nikson Entengo, S.IP.,M.Si.	1. Acer Switch Alpha 12 Tahun 2018	
7	Admira N.N. Wantogia, S.E	1. Lenovo Business Tahun 2018	1. Epson L3110 Tahun 2018
8	Ferdy Rus Modanggu, S.Sos.	1. Acer Aspire 5 A514 - i5 Tahun 2023	
9	Yusnandar Karim, S.HI	1. Acer Aspire 5 A514 - i5 Tahun 2023 2. Lenovo IdeaCenter C360 AIO Tahun 2014	
10	Iswan Maksum, S.IP	1. Asus Tahun 2017	1. Epson L565 Tahun 2018
11	Isnawati M. Makrun, S AB	1. Acer Switch Alpha 12 Tahun 2018 2. Acer Aspire 5 A514 - i7 Tahun 2023	1. Epson L3110 Tahun 2018
12	Sitiyanti S. Pakaya, S.Kom.	1. Dell Inspiron 5368 Tahun 2016	1. Epson L3110 Tahun 2019
13	Moh. Taufik Masie, S.Si		
14	Ratu Vidya Nur'aini, S.I.P.	1. Lenovo Tahun 2015	1. Epson L360 Tahun 2017
15	Muhammad Ikrar Rauf, S.H	1. HP All In One 22 Tahun 2018	1. Epson L360 Tahun 2017
16	Johan Robbi Mahfus Zhafiri, S.H.		1. Epson L3110 Tahun 2018
17	Rahadian Herlangga Wisnu Wardhana, S.H		1. Epson L3110 Tahun 2018
18	Muh. Adib Mustofa, S.H		1. Epson L3110 Tahun 2018
19	Chairul Rizal Gobel, S.H	1. HP All In One 22 Tahun 2018	1. Epson L360 Tahun 2018
20	Reynaldy Yuarlimen Pradana, S.Kom	1. Lenovo Tahun 2019	1. Epson L3110 Tahun 2019
21	Rifky Hermawan Samad, S.I.P.		
22	Dedi Susanto, S.Sos	1. HP All In One 22 Tahun 2018	1. Epson L3110 Tahun 2019
23	Syarif Ali Khan, S.IP	1. HP All In One 22 Tahun 2018 2. Asus A455 L Tahun 2016	
24	Asni Saipi, S.Sos	1. Asus Tahun 2017	1. Epson L3110 Tahun 2018
25	Bambang Urusi, S.Pd	1. HP All In One 22 Tahun 2018	1. Epson L455 Tahun 2016
26	Yolanda Non Rosbin, A.Md	1. Asus Tahun 2017	1. Epson L3210 Tahun 2022
27	Ira Permatasari, S.M.	1. Lenovo Tahun 2019	
28	Donny Hanggoro H. Mukti, S.Si.		1. Epson L3110 Tahun 2018
29	Nadila Dwi Chayani, A.Md.AK	1. Lenovo Business Tahun 2018	
30	Nurul Fauziah, A.Md.AK	1. Lenovo Business Tahun 2018	
31	Adityo Setiawan Ibrahim, S.AP	1. Asus Tahun 2017	1. Epson L3210 Tahun 2022
32	Achmad Polamolo, S.E	1. Lenovo Tahun 2019	1. Epson L565 Tahun 2018
33	Ibnu Lawani	1. Lenovo Tahun 2019	1. Epson L3210 Tahun 2022
34	Awan Abdullah	1. Lenovo C360 AIO Tahun 2014	1. Epson L565 Tahun 2018 2. Epson L5290 Tahun 2022
35	Norpin Ahmad, S.IP	1. Lenovo C360 AIO Tahun 2014	1. Epson L360 Tahun 2017
36	Armin Nur, S.H	1. Asus Tahun 2017 2. HP All-In One 22 Tahun 2018	1. Epson L360 Tahun 2018
37	Ahmad Ali, S.KOM	1. Lenovo C360 AIO Tahun 2014	1. Epson L3110 Tahun 2018
38	Mustika Hidayat Al Anshori, S.Kom	1. HP All In One 22 Tahun 2018	1. Epson L3110 Tahun 2019
39	Ismi F. Mustapa, S.H	1. HP All In One 22 Tahun 2018	1. Epson L565 Tahun 2018
40	Didit Suhandono, S.H	1. Asus A455 L Tahun 2016	

5. Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) dan Roda 2 (dua) pada Provinsi Gorontalo

No	Jenis Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) dan Roda 2 (dua)	Kondisi Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) dan Roda 2 (dua)			Jumlah Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) dan Roda 2 (dua)	Estimasi Kebutuhan Biaya Pemeliharaan (Rp)	Status Kepemilikan
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat			
1	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	10	0	0	10	296.240.000	Milik Sendiri
2	Sepeda Motor	4	0	0	4	-	Milik Sendiri

6. Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) dan Roda 2 (dua) pada Provinsi Gorontalo

No	Nama Pengguna Kendaraan Bermotor	Jabatan Pengguna Kendaraan Bermotor	Roda 4 (empat)		Roda 2 (dua)	
			Plat Nomor Kendaraan	Jenis Kendaraan (Merk, Model dan Tahun Kendaraan)	Plat Nomor Kendaraan	Jenis Kendaraan (Merk, Model dan Tahun Kendaraan)
1	Idris Usui, S.Pd., M.AP.	Ketua	DM 880	Innova Venturer 2018		
2	Ahmad Abdullah, S.Ag	Kordiv Hukum & Penyelesaian Sengketa	DM 884	Innova Venturer 2018		
3	Amin Abdullah	Kordiv SDM	DM 883	Innova Venturer 2018		
4	Lismawy Ibrahim	Kordiv Pencegahan, Partisipasi & Hubungan Masyarakat	DM 882	Innova Venturer 2018		
5	John Hendri Purba	Kordiv Penanganan Pelanggaran, Data & Informasi	DM 881	Innova Venturer 2018		
6	Nikson Entengo, S.IP., M.Si	Kepala Sekretariat	DM 88	Innova Venturer 2018		
7	Admira N.N. Wantogia, S.E	Kabag Administrasi	DM 889	Innova 2013		
8	Ferdy Rus Modanggu, S.Sos.	Kabag Pengawasan	DM 886	Innova 2013		
9	Yusandar Karim, S.HI	Kabag Hukum	DM 887	Innova 2013		
10	Isnawati M. Makrun, S AB	Kasubbag Perencanaan, Keuangan, dan Barang Milik Negara	DM 885	Innova 2013		
11	Sitiyanti S. Pakaya, S.Kom.	Kasubbag Sumber Daya Manusia dan Umum			DM 6986 AO	Sepeda Motor Suzuki Ttian 2013
12	Iswan Maksun, S.IP	Kasubbag Pengawasan Pemih, Akreditasi Pemantau, Data dan Informasi			DM 6998 AO	Sepeda Motor Suzuki Ttian 2013
13	Nadlia Dwi Chayani, A.Md.AK	Pranata Keuangan APBN			DM 6916 AS	Sepeda Motor Suzuki Ttian 2013
14	Rahadian Herlangga Wisnu Wardhana, S.H	Analisis Materi Sidang			DM 6985 AO	Sepeda Motor Suzuki Ttian 2013

C. Aspek Keuangan

1. Data Realisasi Anggaran (sumber data: aplikasi SAKTI laporan Fa Detail (16 Segmen))

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen;

Periode Agustus 2023

Kementerian: 115 BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM
 Unit Organisasi 01 SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 Satuan Kerja : 686438 SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI GORONTALO

31 AGUSTUS 2023

Uraian	Pagu Revisi	Realisasi TA 2023		SISA ANGGARAN
		s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	49.824.666,000	29.819.977,471	59,85 %	20.004.688,529
CQ Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	37,264,426,000	21,080,352,049	56,57 %	16,184,073,951
CQ.5245 Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	883,050,000	520,178,847	58,91 %	362,871,153
BAH Pelayanan Publik Lainnya	167,492,000	88,434,414	52,80 %	79,057,586
BAH.001 Layanan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	167,492,000	88,434,414	52,80 %	79,057,586
201 Pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran (Provinsi)	45,246,000	39,373,813	87,02 %	5,872,187
202 Pembinaan/pelaksanaan penyelesaian sengketa proses (Provinsi)	45,246,000	35,204,601	77,81 %	10,041,399
301 Koordinasi penanganan pelanggaran (Kab./Kota)	38,500,000	4,674,000	12,14 %	33,826,000
302 Koordinasi penyelesaian sengketa proses (Kab./Kota)	38,500,000	9,182,000	23,85 %	29,318,000
BDB Fasilitas dan Pembinaan Lembaga	33,344,000	0	0,00 %	33,344,000
BDB.001 Pengembangan pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan pemilu partisipatif	33,344,000	0	0,00 %	33,344,000
201 Pengembangan pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan pemilu partisipatif (Provinsi)	33,344,000	0	0,00 %	33,344,000
BKC Pemantauan lembaga	682,214,000	431,744,433	63,29 %	250,469,567
BKC.001 Laporan Hasil Pencegahan/ Pengawasan Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	682,214,000	431,744,433	63,29 %	250,469,567
201 Pengawasan pemilu partisipatif (Provinsi)	38,965,000	38,950,700	99,96 %	14,300
202 Fasilitas, koordinasi, dan pelaporan (Provinsi)	163,010,000	162,078,182	99,43 %	931,818
203 Evaluasi pelaksanaan pengawasan (Provinsi)	57,660,000	0	0,00 %	57,660,000
204 Pemutakhiran data pemilih tetap berkelanjutan (Provinsi)	44,239,000	39,886,500	90,16 %	4,352,500
205 Fasilitas penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas (Provinsi)	30,735,000	0	0,00 %	30,735,000
301 Pengawasan pemilu partisipatif (Kab./Kota)	107,145,000	55,691,000	51,98 %	51,454,000
302 Fasilitas, koordinasi, dan pelaporan (Kab./Kota)	108,520,000	68,254,251	62,90 %	40,265,749
303 Evaluasi pelaksanaan pengawasan (Kab./Kota)	21,540,000	2,550,000	11,84 %	18,990,000
304 Pemutakhiran data pemilih tetap berkelanjutan (Kab./Kota)	40,320,000	1,694,900	4,20 %	38,625,100
305 Fasilitas penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas (Kab./Kota)	70,080,000	62,638,900	89,38 %	7,441,100
CQ.6661 Perencanaan, Program Dan Anggaran Serta Penyusunan Peraturan	18,296,571,000	7,117,653,799	38,90 %	11,178,917,201
CQ.6661 Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu		7,117,653,799	38,90 %	11,178,917,201
QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	18,226,571,000	7,058,653,799	38,73 %	11,167,917,201
QIC.001 Fasilitas dan Pembinaan Perencanaan, Program dan Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu	17,592,271,000	6,605,435,549	37,55 %	10,986,835,451
201 Perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu (Provinsi)	12,748,000	0	0,00 %	12,748,000
202 Sosialisasi dan implementasi peraturan Bawaslu dan produk hukum non peraturan Bawaslu (Provinsi)	62,511,000	29,405,000	47,04 %	33,106,000
203 Fasilitas dan pembinaan aparatur pengawas pemilu (Provinsi)	235,958,000	151,676,700	64,28 %	84,281,300
204 Sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif (Provinsi)	361,714,000	38,395,800	10,61 %	323,318,200
205 Fasilitas dan pembinaan penanganan pelanggaran (Provinsi)	592,793,000	45,885,000	7,74 %	546,908,000
206 Fasilitas dan pembinaan penyelesaian sengketa (Provinsi)	56,144,000	5,400,000	9,62 %	50,744,000
207 Fasilitas, koordinasi, dan pelaporan (Provinsi)	2,056,632,000	1,171,241,383	56,95 %	885,390,617
208 Fasilitas pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu (Provinsi)	45,568,000	32,815,084	72,01 %	12,752,916
301 Perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu (Kab./Kota)	150,317,000	23,128,000	15,39 %	127,189,000
302 Sosialisasi dan implementasi peraturan dan non peraturan Bawaslu (Kab./Kota)	439,779,000	141,743,000	32,23 %	298,036,000
303 Fasilitas dan pembinaan aparatur pengawas pemilu (Kab./Kota)	2,287,880,000	945,199,635	41,31 %	1,342,680,365
304 Sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif (Kab./Kota)	1,157,893,000	571,113,400	49,32 %	586,779,600
305 Fasilitas dan pembinaan penanganan pelanggaran (Kab./Kota)	1,931,080,000	455,831,200	23,60 %	1,475,248,800

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen;

Periode Agustus 2023

Kementerian: 115 BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM
 Unit Organisasi: 01 SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 Satuan Kerja : 686438 SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI GORONTALO

31 AGUSTUS 2023

Uraian	Pagu Revisi	Realisasi TA 2023		SISA ANGGARAN
		s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	49.824.866,000	29.819.977,471	59,85 %	20.004.688,529
306 Fasilitasi dan pembinaan penyelesaian sengketa (Kab./Kota)	594.504,000	284.005,200	47,77 %	310.498,800
307 Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan (Kab./Kota)	2.968.680,000	729.054,847	24,56 %	2.239.625,153
308 Fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu (Kab./Kota)	438.230,000	189.013,300	43,13 %	249.216,700
401 Fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas pemilu (Kecamatan)	1.122.040,000	912.228,000	81,30 %	209.812,000
402 Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan (Kecamatan)	3.077.800,000	879.300,000	28,57 %	2.198.500,000
QIC.003 Seleksi Anggota Badan Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilu Ad-Hoc	634.300,000	453.218,250	71,45 %	181.081,750
401 Rekrutmen panwaslu desa/kelurahan (Kecamatan)	634.300,000	453.218,250	71,45 %	181.081,750
UAB Sistem Informasi Pemerintahan	70.000,000	59.000,000	84,29 %	11.000,000
UAB.001 Pengembangan Sistem Informasi Bawaslu	70.000,000	59.000,000	84,29 %	11.000,000
201 Pengadaan sarpras pendukung sistem informasi (Provinsi)	70.000,000	59.000,000	84,29 %	11.000,000
CQ.6662 Pengawasan Pendaftaran Dan Verifikasi Peserta Pemilu	19.834,000	18.358,500	92,56 %	1.475,500
QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	19.834,000	18.358,500	92,56 %	1.475,500
QIC.001 Pengawasan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu	19.834,000	18.358,500	92,56 %	1.475,500
203 Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu (Provinsi)	13.600,000	13.600,000	100,00 %	0
303 Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu (Kab./Kota)	6.234,000	4.758,500	76,33 %	1.475,500
CQ.6838 Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Oleh Lembaga Ad-Hoc	12.258.720,000	11.303.411,045	92,21 %	955.308,955
QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	12.258.720,000	11.303.411,045	92,21 %	955.308,955
QIC.001 Honorarium Pengawas Ad-Hoc	6.963.200,000	6.797.300,000	97,62 %	165.900,000
401 Honorarium (Kecamatan)	3.804.000,000	3.803.100,000	99,98 %	900,000
501 Honorarium (Kelurahan/Desa)	3.159.200,000	2.994.200,000	94,78 %	165.000,000
QIC.002 Operasional Pengawas Ad-Hoc	5.295.520,000	4.506.111,045	85,09 %	789.408,955
301 Sewa kendaraan operasional (Kab./Kota)	2.448.360,000	2.083.066,908	85,08 %	365.293,092
302 Sewa gedung/ peralatan/ meubelair (Kab./Kota)	408.000,000	225.664,000	55,31 %	182.336,000
402 Sewa gedung/ peralatan/ meubelair (Kecamatan)	1.535.400,000	1.413.200,000	92,04 %	122.200,000
404 Pelayanan operasional perkantoran (Kecamatan)	831.960,000	712.380,137	85,63 %	119.579,863
502 Penanda identitas (Kelurahan/Desa)	71.800,000	71.800,000	100,00 %	0
CQ.6839 Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih	1.861.360,000	1.219.149,074	65,50 %	642.210,926
QCE Penanganan Perkara	187.800,000	64.222,374	34,20 %	123.577,626
QCE.001 Penanganan Pelanggaran Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih	187.800,000	64.222,374	34,20 %	123.577,626
202 Penyelenggaraan penanganan pelanggaran pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Provinsi)	54.360,000	37.703,824	69,36 %	16.656,176
302 Penyelenggaraan penanganan pelanggaran pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Kab./Kota)	133.440,000	26.518,550	19,87 %	106.921,450
QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	1.673.560,000	1.154.926,700	69,01 %	518.633,300
QIC.001 Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih	1.673.560,000	1.154.926,700	69,01 %	518.633,300
201 Publikasi dan dokumentasi pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Provinsi)	8.010,000	6.210,000	77,53 %	1.800,000
202 Pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Provinsi)	30.710,000	29.686,000	96,67 %	1.024,000
203 Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Provinsi)	56.540,000	10.390,000	18,38 %	46.150,000
301 Publikasi dan dokumentasi pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Kab./Kota)	38.080,000	8.909,800	23,40 %	29.170,200
302 Pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Kab./Kota)	83.520,000	36.416,000	43,60 %	47.104,000
303 Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Kab./Kota)	357.100,000	11.624,900	3,26 %	345.475,100
401 Pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Kecamatan)	668.800,000	620.890,000	92,84 %	47.910,000

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen;

Periode Agustus 2023

Kementerian: 115 BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM
 Unit Organisasi: 01 SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 Satuan Kerja : 686438 SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI GORONTALO

31 AGUSTUS 2023

Uraian	Pagu Revisi	Realisasi TA 2023		SISA ANGGARAN
		s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	49,624,666,000	29,619,977,471	59.85 %	20,004,688,529
501 Pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Kelurahan/Desa)	430,800,000	430,800,000	100.00 %	0
CQ.6840 Pengawasan Penetapan Peserta Pemilu	47,562,000	47,279,800	99.41 %	282,200
QCE Penanganan Perkara	2,555,000	2,555,000	100.00 %	0
QCE.001 Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Penetapan Peserta Pemilu	2,555,000	2,555,000	100.00 %	0
202 Penyelenggaraan penanganan pelanggaran penetapan peserta pemilu (Provinsi)	2,555,000	2,555,000	100.00 %	0
QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	45,007,000	44,724,800	99.37 %	282,200
QIC.001 Pengawasan Penetapan Peserta Pemilu	45,007,000	44,724,800	99.37 %	282,200
201 Publikasi dan dokumentasi pengawasan penetapan peserta pemilu (Provinsi)	300,000	300,000	100.00 %	0
202 Pengawasan penetapan peserta pemilu (Provinsi)	23,585,000	23,584,800	100.00 %	200
301 Publikasi dan dokumentasi pengawasan penetapan peserta pemilu (Kab./Kota)	2,750,000	2,750,000	100.00 %	0
302 Pengawasan penetapan peserta pemilu (Kab./Kota)	18,372,000	18,090,000	98.47 %	282,000
CQ.6841 Pengawasan Penetapan Jumlah Kursi Dan Penetapan Daerah Pemilihan	108,316,000	107,946,800	99.66 %	369,200
QCE Penanganan Perkara	65,260,000	65,194,800	99.90 %	65,200
QCE.001 Penanganan Pelanggaran Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	65,260,000	65,194,800	99.90 %	65,200
201 Penyelenggaraan penanganan pelanggaran penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan (Provinsi)	38,160,000	38,160,000	100.00 %	0
301 Penyelenggaraan penanganan pelanggaran penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan (Kab./Kota)	27,100,000	27,034,800	99.76 %	65,200
QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	43,056,000	42,752,000	99.29 %	304,000
QIC.001 Pengawasan Penetapan Jumlah Kursi Dan Penetapan Daerah	43,056,000	42,752,000	99.29 %	304,000
QIC.001 Pemilihan	43,056,000	42,752,000	99.29 %	304,000
201 Publikasi dan dokumentasi pengawasan penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan (Provinsi)	3,955,000	3,651,000	92.31 %	304,000
202 Pengawasan penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan (Provinsi)	31,205,000	31,205,000	100.00 %	0
301 Publikasi dan dokumentasi penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan (Kab./Kota)	500,000	500,000	100.00 %	0
302 Pengawasan penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan (Kab./Kota)	7,396,000	7,396,000	100.00 %	0
CQ.6842 Pengawasan Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota	3,789,013,000	746,374,184	19.70 %	3,042,638,816
QCE Penanganan Perkara	802,422,000	144,400,184	18.00 %	658,021,816
QCE.001 Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	802,422,000	144,400,184	18.00 %	658,021,816
201 Pengelolaan data penanganan pelanggaran pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Provinsi)	13,052,000	3,848,250	29.48 %	9,203,750
202 Penyelenggaraan penanganan pelanggaran pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Provinsi)	109,490,000	83,971,434	76.69 %	25,518,566
203 Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Provinsi)	54,960,000	28,240,500	51.38 %	26,719,500
301 Pengelolaan data penanganan pelanggaran pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Kab./Kota)	413,400,000	14,315,000	3.46 %	399,085,000
302 Penyelenggaraan penanganan pelanggaran pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Kab./Kota)	105,760,000	6,875,000	6.50 %	98,885,000
303 Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Kab./Kota)	105,760,000	7,150,000	6.76 %	98,610,000
QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	2,986,591,000	601,974,000	20.16 %	2,384,617,000
QIC.001 Pengawasan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	2,986,591,000	601,974,000	20.16 %	2,384,617,000
201 Publikasi dan dokumentasi pengawasan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Provinsi)	9,510,000	7,535,000	79.23 %	1,975,000
202 Pengawasan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Provinsi)	69,456,000	66,054,000	95.10 %	3,402,000
203 Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Provinsi)	53,565,000	20,845,000	38.92 %	32,720,000

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen;

Periode Agustus 2023

Kementerian: 115 BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM
 Unit Organisasi 01 SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 Satuan Kerja : 686438 SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI GORONTALO

31 AGUSTUS 2023

Uraian	Pagu Revisi	Realisasi TA 2023		SISA ANGGARAN
		s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	49.824.666,000	29.819.977,471	59,85 %	20.004.688,529
301 Publikasi dan dokumentasi pengawasan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Kab./Kota)	38,060,000	1,050,000	2.76 %	37,010,000
302 Pengawasan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Kab./Kota)	385,300,000	119,288,750	30.96 %	266,011,250
303 Fasilitas sentra gakkumdu tahapan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Kab./Kota)	357,100,000	41,417,250	11.60 %	315,682,750
401 Pengawasan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Kecamatan)	2,073,600,000	345,784,000	16.68 %	1,727,816,000
WA Program Dukungan Manajemen	12,560,240,000	8,739,625,422	69,58 %	3,820,614,578
WA.4355 Pemeriksaan, Pengendalian, Dan Pengawasan Internal	29,710,000	7,240,000	24,37 %	22,470,000
EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	29,710,000	7,240,000	24,37 %	22,470,000
EBD.961 Layanan Reformasi Kinerja	29,710,000	7,240,000	24,37 %	22,470,000
201 Implementasi reformasi birokrasi Bawaslu dan Bawaslu Provinsi	9,300,000	0	0.00 %	9,300,000
301 Implementasi reformasi birokrasi Bawaslu dan Bawaslu Kabupaten/Kota	20,410,000	7,240,000	35.47 %	13,170,000
WA.4356 Pengelolaan Data dan Informasi	180,346,000	86,892,963	48,18 %	93,453,037
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	180,346,000	86,892,963	48,18 %	93,453,037
EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Bawaslu	65,922,000	7,335,900	11,13 %	58,587,000
201 Pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi publik Bawaslu Provinsi	45,232,000	3,235,000	7.15 %	41,997,000
301 Pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota	20,690,000	4,100,000	19.82 %	16,590,000
EBA.963 Layanan Data dan Informasi	114,424,000	79,557,963	69,53 %	34,866,037
201 Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik Bawaslu Provinsi	93,734,000	75,592,963	80.65 %	18,141,037
301 Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota	20,690,000	3,965,000	19.16 %	16,725,000
WA.6849 Pengelolaan Keuangan, BMN, Dan Umum	11,870,530,000	8,450,349,178	71,19 %	3,420,180,822
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	11,166,811,000	7,972,757,218	71,40 %	3,194,053,782
EBA.956 Layanan BMN	126,202,000	45,946,400	36,41 %	80,255,600
201 Pembinaan dan pengelolaan BMN Bawaslu Provinsi	102,952,000	34,600,400	33.61 %	68,351,600
301 Pengelolaan BMN Bawaslu Kabupaten/Kota	23,250,000	11,346,000	48.80 %	11,904,000
EBA.994 Layanan Perkantoran	11,040,609,000	7,926,810,818	71,80 %	3,113,798,182
001 Gaji dan Tunjangan	5,594,916,000	4,505,424,159	80.53 %	1,089,491,841
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	5,445,693,000	3,421,386,659	62.83 %	2,024,306,341
EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	90,376,000	76,050,000	84,15 %	14,326,000
EBB.951 Layanan Sarana Internal	90,376,000	76,050,000	84,15 %	14,326,000
203 Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran Bawaslu Provinsi	90,376,000	76,050,000	84.15 %	14,326,000
EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	613,343,000	401,541,960	65,47 %	211,801,040
EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	59,858,000	38,138,823	63,72 %	21,719,177
201 Penyusunan rencana kerja dan anggaran Bawaslu Provinsi	41,448,000	32,262,823	77.84 %	9,185,377
301 Penyusunan rencana kerja dan anggaran Bawaslu Kabupaten/Kota	18,410,000	5,876,200	31.92 %	12,533,800
EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	52,100,000	34,626,583	66,46 %	17,473,417
201 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Bawaslu Provinsi	47,260,000	32,336,583	68.42 %	14,923,417
301 Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program Bawaslu Kabupaten/Kota	4,840,000	2,290,000	47.31 %	2,550,000
EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	473,767,000	325,226,554	68,65 %	148,540,446
201 Pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan Bawaslu Provinsi	169,292,000	93,591,424	55.28 %	75,700,576
301 Pengelolaan administrasi keuangan Bawaslu Kabupaten/Kota	304,475,000	231,635,130	76.08 %	72,839,870
EBD.974 Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	27,618,000	3,550,000	12,85 %	24,068,000
201 Pembinaan dan pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan Bawaslu Provinsi	7,850,000	0	0.00 %	7,850,000

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen;

Periode Agustus 2023

Kementerian: 115 BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM
 Unit Organisasi: 01 SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 Satuan Kerja : 686438 SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI GORONTALO

31 AGUSTUS 2023

Uraian	Pagu Revisi	Realisasi TA 2023		SISA ANGGARAN
		s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	49,824,666,000	29,819,977,471	59.85 %	20,004,688,529
301 Pengelolaan kelatasausahaan dan kearsipan Bawaslu Kabupaten/Kota	19,768,000	3,550,000	17.96 %	16,218,000
WA.6850 Pengelolaan Organisasi Dan SDM	479,654,000	195,143,281	40.68 %	284,510,719
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	348,158,000	104,679,734	30.07 %	243,478,266
EBA.957 Layanan Hukum	136,368,000	30,059,200	22.04 %	106,308,800
201 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan produk hukum di Bawaslu Provinsi	37,958,000	19,830,000	52.24 %	18,128,000
202 Diseminasi produk hukum di Bawaslu Provinsi	33,240,000	420,000	1.26 %	32,820,000
203 Kajian hukum di Bawaslu Provinsi	5,850,000	2,053,400	35.10 %	3,796,600
301 Fasilitasi pengelolaan layanan hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota	48,680,000	7,755,800	15.93 %	40,924,200
302 Kajian hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota	10,640,000	0	0.00 %	10,640,000
EBA.962 Layanan Umum	108,170,000	53,258,954	49.24 %	54,911,046
201 Fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu Provinsi	46,990,000	31,184,000	66.36 %	15,806,000
301 Fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu Kabupaten/Kota	61,180,000	22,074,954	36.08 %	39,105,046
EBA.969 Layanan Bantuan Hukum	103,620,000	21,361,580	20.62 %	82,258,420
201 Pendampingan dan layanan bantuan hukum di Bawaslu Provinsi	29,200,000	0	0.00 %	29,200,000
202 Pembinaan bantuan hukum di Bawaslu Provinsi	34,420,000	21,361,580	62.06 %	13,058,420
301 Bantuan hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota	40,000,000	0	0.00 %	40,000,000
EBC Layanan Manajemen SDM Internal	131,496,000	90,463,547	68.80 %	41,032,453
EBC.954 Layanan Manajemen SDM	131,496,000	90,463,547	68.80 %	41,032,453
201 Pembinaan SDM pengawas dan kesekretariatan Bawaslu Provinsi	61,936,000	54,986,047	88.78 %	6,949,953
301 Manajemen SDM pengawas dan kesekretariatan Bawaslu Kabupaten/Kota	69,560,000	35,477,500	51.00 %	34,082,500

Hal 5 dari 5

Mengetahui
 Kepala Sekretariat,


 Nikson Entengo, S.IP., M.Si
 NIP. 19791122 200212 1 008

